

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KONSEP DAKWAH ISLAM SEBAGAI IDEOLOGI INDONESIA MASA MENDATANG

¹Dewi Setyawati, ²Apriana, ³Yuliarni

¹Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: destya11@gmail.com

²Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : apriana_fkip@um-palembang.ac.id

³Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : yuliarni@um-palembang.ac.id

Abstract: *Education can be formed through character education based on Islamic values. Character education in the concept of Islamic da'wah is based on the values contained in the Al-Quran. In the concept of Islamic da'wah students are taught aqidah as the basis of their religion, taught the Koran and hadith as a way of life, taught fiqh as legal signs in worship, taught Islamic history as an example of life, and taught morals as a guide for human behavior whether in the good category or bad. The application of character education through Islamic da'wah aims to shape the character of students who are Islamic in society. This research uses literature study. The result of this study is the formation of personality in students which is reflected in their behavior and mindset in everyday life.*

Keywords: *Education, Character, Da'wah, Politics, Islam, Al Quran*

PENDAHULUAN

Pendidikan secara umum dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju pada tataran yang semestinya, yaitu terciptanya manusia seutuhnya, meliputi adanya keseimbangan aspek-aspek kemanusiaan yang selaras dan serasi baik lahir batin. Di dalamnya terkandung makna yang berkaitan dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi menuju *Insan Kamil* (Ahmadi, 1992, p.16).

Pendidikan yang tidak mampu membentuk siswa yang memiliki kecerdasan rasa dan budi pekerti sebagaimana dalam potret suram di atas akan berdampak pada anak menjadi tidak dewasa dan tidak tanggung jawab. Bila siswa tersebut hidup dalam masyarakat yang majemuk, mereka kurang dapat menyesuaikan dengan kondisi kemajemukan masyarakat tersebut dan akhirnya akan mudah tersulut dan kurang dapat menghargai sebuah kemajemukan dalam hidup, kurang bisa menerima perbedaan yang terjadi apalagi kalau sudah menyangkut agama misalnya bagi mereka akan mudah bertindak anarkis (Muhsinin, 2013, p. 207)

Fenomena merosotnya karakter berbangsa di tanah air dapat disebabkan lemahnya pendidikan karakter dalam meneruskan nilai-nilai kebangsaan pada saat alih generasi. Di samping itu, lemahnya implementasi nilai-nilai berkarakter di lembaga-lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan ditambah berbaurnya arus globalisasi telah mengaburkan kaidah-kaidah moral budaya bangsa yang sesungguhnya bernilai tinggi. Akibatnya, perilaku-prilaku tidak normatif semakin

jauh merasuk ke dalam dan berakibat merusak kehidupan berbangsa. Warga negara yang demokratis, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, berakhlak mulia, memiliki moral demokratis, sebagaimana dicantumkan dalam, UU No 2 tahun 1989, UU No 20 tahun 2003, belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan (Prayitno, 2011, p. 2)

Islam adalah suatu agama Dakwah, sebagai luasan ruang lingkupnya. Al-Qur'an memerintahkan dakwah persuasi dan melarang cara kekerasan dalam suatu usaha menarik penganut baru. Tersebarinya agama ini ke berbagai pelosok dunia adalah disebabkan oleh berbagai faktor, baik sosial, politik maupun agama, akan tetapi disamping itu, satu faktor yang paling kuat dan menentukan adalah kemauan dan kegiatan yang tak kenal lelah dari para mubaligh Islam yang dengan Nabi sendiri sebagai contoh utamanya (Homas, 1977, p. 2). Pendidikan agama pertama kali diberikan melalui pendidikan keluarga sebagai salah satu landasan bagi kehidupan bermasyarakat. Pendidikan agama diupayakan agar tidak berhenti pada pengetahuan saja akan tetapi ia benar-benar dapat memahami, menghayati serta menerapkannya (Achmad, 2020, p. 178)

Islam sebagai agama memiliki aturan dan sistem yang sempurna. Kesempurnaan itu menyangkut aturan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya (alam). Oleh karena itu Islam dinamakan agama rahmatan lil'alam. Menghormati agama lain dan sesama pemeluk agama yang berbeda juga dianjurkan saling menghormati (Muhsinin, 2013, p. 208)

Dalam Islam, pembangunan karakter merupakan masalah fundamental untuk membentuk umat yang berkarakter. Pembangunan karakter dibentuk melalui pembinaan akhlakul karimah (akhlak mulia); yakni upaya transformasi nilai-nilai qur'ani kepada anak yang lebih menekankan aspek afektif atau wujud nyata dalam amaliyah seseorang. Selain itu, Islam melihat bahwa identitas dari manusia pada hakikatnya adalah akhlak yang merupakan potret dari kondisi batin seseorang yang sebenarnya. Makanya dalam hal ini Allah Swt, begitu tegas mengatakan bahwa manusia mulia itu adalah manusia yang bertakwa (tunduk atas segala perintah-Nya). Kemuliaan manusia di sisi-Nya bukan diukur dengan nasab, harta maupun fisik, melainkan kemuliaan yang secara batin memiliki kualitas keimanan dan mampu memancarkannya dalam bentuk sikap, perkataan dan perbuatan (Q.S. Hujurat: 13)

Bagi kebanyakan Muslim pembangunan politik tidaklah mungkin tanpa Islam, bagi kebanyakan ilmuwan Barat, Islam sebagaimana juga agama-agama lain, merupakan penghalang pembangunan politik. Kenyataan bahwa banyak pemimpin Muslim dengan keras menolak praktek-praktek politik Barat dan banyak ahli Barat menolak Islam karena menganggapnya sebagai penyebar pengaruh primitif dan barbarian terhadap politik (Jhon, 1981, p. 29). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari dua pihak tersebut, tetapi sebetulnya adanya konflik pendapat itu dalam banyak hal disebabkan oleh tidak mengenal satu sama lain akibat adanya prasangka dan stereotipe kultural yang negatif yang selama ini ada di kedua belah pihak.

Soal kebangkitan Islam yang terjadi saat ini, itulah tugas dakwah umat Islam saat ini. Kekhawatiran terhadap kebangkitan Islam antara lain, karena dakwah umat Islam selama ini sering tampil dalam wajah yang kurang utuh, kurang manusiawi. Selama ini, dakwah lebih bermakna mengejek daripada mengajak. Islam sering tampil dalam wajah yang tidak utuh (Zainuddin, 1997, p. 181). Begitu pula prospek perkembangan Islam di Indonesia, jelas tergantung pada perjuangan kita sebagai umat muslim. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa suatu saat tidak mustahil Islam hanya tinggal sekadar nama dan Al Quran hanya tinggal tulisan. Apakah itu akan menjadi kenyataan, tergantung bagaimana umat Islam menjaganya saat ini, tetapi tidak satu ayat Al Quran yang menjamin Islam akan abadi di Indonesia, kalau kita tidak menjaganya, tidak memeliharanya, dan tidak mewariskannya kepada anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang pada intinya peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data maupun angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitnesses*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya; teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula (Soewadji, 2012, p. 60). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari dokumen yang secara harfiah ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012, p. 240). Penelitian ini merujuk kepada sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta studi literatur-literatur yang relevan dengan kajian dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan filosofis, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan temuan-temuan data dan informasi dari berbagai literatur yang dijadikan penulis sebagai rujukan. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini, mengingat bahwa data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, maka dipakailah teknik "analisis isi" atau content analysis (Suryabrata, 1983, p. 94). Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumen untuk mengungkap sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan-bahan berbentuk dokumentasi (Sujarweni, 2019, p. 33).

PEMBAHASAN

Islam dan Perkembangan Politik

Bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam (Nurcholish, 1993, p. 3). Dalam kultur populer Barat, Islam selama ini selalu dipandang dengan prasangka dan rasa rendah. Kenyataan ini semakin diperburuk oleh beberapa ahli Timur yang menciptakan mitologi tentang sifat dasar (*nature*) dan

kultur Islam yang semua itu telah berpengaruh pada banyak orang sehingga mereka berpendapat bahwa Islam tidak cocok bagi kemajuan atau pembangunan (Jhon,1981,p. 30).

Kalau pola pembangunan politik Barat membutuhkan dasar empiris , pola pembangunan politik Islam adalah satu ungkapan normatif yang jelas. Teori politik Muslim yang diterapkan sekarang mempunyai acuan arah yang sama dengan sistem yang pernah mendominasi teori politik Barat sebelum era modern (Jhon,1981,p. 32). Kita tidak ingin mempertentangkan kedua pandangan tersebut, karena nyatanya sekulerisme Barat dan Islam, keduanya sama-sama memikirkan kebaikan dunia, hanya saja Islam menggagas kebaikan manusia sebagai hal penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik itu.

Ciri utama pemerintah Islam yang ideal atau maju adalah suatu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada firman Tuhan. Takwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al Quran Surat Al A'raf ayat 26, adalah laksana pakaian terbaik manusia dari pakaian macam apapun. Sebagaimana pakaian, takwa adalah seragam umat beriman yang menyebabkannya sanggup menyikapi orang lain sama dengan dirinya. Ini watak *egaliter* yang *inheren* dalam semangat apa yang disebut kehidupan sosial. Kesadaran egalitarian inilah yang melapangkan sesak napas kehidupan yang ditimbulkan oleh ancaman pelecehan hak-hak dan martabat sosial perorangan dalam komunitas sosial-politik (Imam,1997, p. 35).

Masyarakat Islam yang berpolitik maju adalah masyarakat hukum. Pemerintah dan Rakyat di atur oleh syariat yang ditafsirkan dan diterapkan oleh para cendekiawan, para ulama dan ahli hukum, atau para *fuqaha*. Sebagai suatu agama yang memperhatikan masalah duniawi dan akhirat, Islam penuh dengan hal-hal yang mengatur tingkat laku manusia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak sebagaimana ditentukan oleh Nabi (Jhon, 1981, p. 33). Idealnya, pemimpin masyarakat adalah pemimpin agama, khalifah atau imam, dan kekuasaannya ditetapkan oleh *baya* (sumpah penguat) dari anggota masyarakat yang terkemuka. Walaupun Islam tidak memerinci secara jelas struktur pemerintahan komunal (dan jauh sebelum kekhalifahan dihapuskan pada tahun 1924, lembaga itu sudah kehilangan kekuatan politisnya). Jelas bahwa apa pun bentuk pemerintahan itu berdasarkan keagamaan atau sekuler haruslah menggunakan Firman atau Hukum Tuhan sebagai pedoman. Al Quran merupakan tempat penting berpaling dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya dilakukan oleh orang banyak atau masyarakat.

Dalam memahami politik dari sudut Islam sekarang ini adalah mengenali adanya upaya untuk memisahkan salah satu cabang kehidupan manusia yang ada urusannya dengan penggunaan kekuasaan ini dari sudut konsepsi, teori, pandangan dan akhirnya praktek umat Islam. Umat Islam dalam kehidupan modern ini menjadi terasing dan alergi bahkan mengartikan salah politik atau institusi politik. Berpolitik, berpartai politik atau berkampanye dianggap sebagai sebuah tabu dan aneh dalam kehidupan seorang Muslim. Inilah yang menjadi tragedi dalam Umat Islam

sehingga sifat Islam yang syumul menjadi terkucil manakala berbicara mengenai pentingnya tata kenegaraan baik para pejabat dan institusinya dicelup ke dalam Islam.

Pendidikan Nilai Karakter dalam Konsep Dakwah Islam

Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pengintegrasian antara kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter menurut Thomas Lichona merupakan media pembantu bagi peserta didik untuk memahami, peduli, dan berbuat atau bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Sejalan dengan itu, Suyanto menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*) dan tindakan (*action*) (Anwas,2010, p. 257)

Dalam rancangan (*grand design*) pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dikatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai luhur tersebut berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan dan nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari (Johansyah,2011, p. 88)

Pendidikan karakter dalam Islam berarti pendidikan karakter sebagaimana dalam pengertian secara umum yang didasarkan pada segi-segi ajaran Islam sebagai substansi materi yang produknya adalah karakter Islami yaitu karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam al-Qur'an terdapat multi pendekatan yang dapat diidentifikasi terkait pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Beberapa pendekatan dalam pendidikan karakter adalah: pertama, pendekatan teosentris (Q.S. Al Baqarah: 1-7, Q.S. Al-'Alaq: 1-5) dan beberapa ayat lainnya. Kedua, pendekatan antropologis, ketiga, pendekatan historis, seperti cerita para Nabi, cerita Fir'aun, Namruj dan lain-lainnya. Keempat, pendekatan personality (kepribadian), cerita Nabi Muhammad, Lukmanul Hakim dan lain-lainnya. Kelima, pendekatan filsafat, di mana Allah Swt memotivasi manusia untuk memperhatikan, memikirkan ciptaan-Nya. Dan keenam, pendekatan psikologis, serta pendekatan-pendekatan lainnya (Johansyah,2011, p. 98)

Karakter dalam Islam lebih akrab disapa dengan akhlak, kepribadian serta watak seseorang yang dapat di lihat dari sikap, cara bicara dan berbuat yang kesemuanya melekat dalam dirinya menjadi sebuah identitas dan karakter sehingga sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya. Manusia akan tampil sebagaimana kebiasaan, budaya dan adat istiadat kesehariannya, sebab manusia merupakan anak kandung budaya, baik keluarga maupun masyarakatnya di samping anak kandung dari agama yang dipeluknya.

Dalam konteks pendidikan karakter, yang menjadi unsur utama adalah peserta didik atau siswa sedang siswa secara naluriah dan alamiah dalam pandangan Islam sudah memiliki potensi “fitrah” atau dasar pembawaan yang baik namun sifat pembawaan dasar tadi tidak secara otomatis menjadi baik tanpa pendidikan. Dengan demikian semua fitrah peserta didik tadi juga harus dikawal dengan pendidikan agar menjadi baik. Hal ini diperkuat dengan hadis nabi yang menegaskan bahwa tugas kenabian Muhammad Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam Islam, pentingnya pendidikan karakter dapat di lihat dari penekanan pendidikan akhlak yang secara teoritis berpedoman kepada Alquran dan secara praktis mengacu kepada kepribadian Nabi Muhammad saw. Profil beliau tidak mungkin diragukan lagi bagi setiap muslim, bahwa beliau merupakan role model (tauladan) sepanjang zaman. Keteladanannya telah diakui oleh Alquran yang mengatakan; ‘Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung’. (QS al Qalam [68]: 4) Dalam sebuah hadits Nabi saw, bersabda: “Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.” (HR. Ahmad)

Sebagai agama, Islam terdiri dari keyakinan atau iman dan rasa memiliki, dan dalam praktiknya kedua unsur tersebut saling berinteraksi. Dalam interaksi ini, kehidupan sosial dan politik umat Islam definisikan secara berbeda-beda di kalangan kaum muslimin. Dalam membuat kebijakan atau peraturan untuk seluruh masyarakat, para anggotanya hendaknya bermusyawarah satu sama lain. Orang-orang yang terlibat dalam proses pencarian dan konsultasi dengan Al Quran ini adalah para pemimpin agama yang mewakili seluruh masyarakat (Syaiful,1997,p. 52)

Politik dan dakwah islam terasa aneh bagi sebagian orang adalah dua hal yang sangat kontras. Dakwah adalah gerakan yang bernafaskan islam yang mengajak manusia untuk amar maruf nahi munkar, sedangkan politik dari sebagian orang berpendapat tentang kekuasaan. Metode dakwah sudah tertulis dalam Al Quran :*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. An-Nahl:125)

Masyarakat Islam tidak saja berimbang secara adil, tetapi juga secara ideal dillhami oleh mis moral dan sikap aktif. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran :*“Maka Kami Jadikan kamu umat yang mempunyai peraturan yan adil dan ini akan kamu saksikan dimana-mana”* (Q.S. Al Baqarah: 143). Ayat lain yang mengajurkan umat Muslim untuk berusaha memperbaiki keadaannya sendiri adalah : *“Tuhan tidak akan mengubah kondisi umat kalau mereka sendiri tidak mengubahnya”* (Q.S. Ar Rad : 11). Ini membantah anggapan yang diciptakan oleh para Orientalis yang mengatakan bahwa fatalisme adalah salah satu ciri Islam. Mengenai masalah politik, firman Tuhan dengan Jelas mengatakan *Bangunlah, dan kembangkan masyarakat untuk melaksanakan tugas sucimu di Dunia* (Jhon, 1981,p. 34)

Sebagai contoh M. Natsir. Beliau adalah tokoh dakwah di era Sukarno. Dalam dakwahnya beliau mengambil ideologi islam dengan istilah Modernitas Politik

Islam yang mengandung arti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat Islam. Dalam term politik seperti ini maka M. Natsir mewajibkan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai media dakwah.

Sebagai konsekuensi logis dari pernyataan ini, maka M. Natsir telah membuktikan dirinya berjuang sebagai pimpinan partai politik Islam yaitu Masyumi. Dalam gerakan dakwahnya M. Natsir mempunyai kesesuaian yang cukup dekat dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam kapasitasnya sebagai kepala agama dan kepala negara. Pada periode Madinah, menggunakan kekuatan dakwah dan politik sebagai upaya untuk Amar Maruf Nahi Munkar. Pada periode Madinah Rasulullah telah melaksanakan dakwah dengan politik maupun dengan dakwah murni. Hal serupa juga dilakukan oleh M. Natsir, sebagai perdana menteri RI dan ketua umum Partai Masyumi, telah menggunakan kekuatan politik untuk berdakwah Amar Maruf Nahi Munkar. Di sini hubungan kekuasaan dengan dakwah akan sangat membantu mempercepat tercapainya tujuan dakwah, hal seperti inilah yang dirasakan oleh umat Islam, baik pada zaman Rasulullah sahabat maupun pada masa kejayaan Islam di Indonesia hal ini membuktikan bahwa berdakwah tanpa kekuatan dan kemauan politik (kekuasaan) akan terasa sulit bagi penyebaran dakwah Islam, karena dakwah Islam seperti ini sudah pasti berhadapan dengan kekuatan politik di luar Islam sebagai penentangnya seperti pernah dialami oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah dalam lingkungan kaum Quraisy. Demikian juga yang dialami Dai di Indonesia pada waktu itu yang berada dalam tekanan kaum penjajah.

Sedangkan antara syariah Islam dan politik Hasan al-Banna yang dikenal sebagai pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang moderat, memberikan sumbangan yang jelas bagi penyatuan antar Islam dan Politik. Ia berkeyakinan bahwa pengakuan "tidak ada Tuhan selain Allah" berarti umat Islam wajib bergantung pada hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan Muslim. Dalam politik, hal itu berarti keharusan untuk mendirikan pemerintahan Tuhan di muka bumi (Syaiiful, 1997, p. 54).

Prinsip-prinsip dalam Al-Quran ini lebih diuraikan lagi oleh para filsuf besar politik Islam. Adanya anggapan bahwa ajaran intelektual Islam tidak mempunyai sumbangan terhadap teori-teori politik besar, hubungan antara hukum, Tuhan dan Negara, akal sehat dan rasionalitas, masyarakat yang shaleh dengan dasar moralitas negara, ciri kedaulatan hukum yang besar dengan keadilan dan tanggungjawab, kemungkinan bagi evolusi sosial dan politik sama dengan melupakan Al-Farabi, Al-Ghazali, Averroes, Al-Mawardi, Ibn Khaldun dan para pemikir besar lainnya (Jhon, 1981, p. 35).

Di samping itu, adanya anggapan bahwa Islam itu statis dan kaku dalam segi politik yang karenanya tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi politik dan

sosio-ekonomi modern sama dengan menutup mata terhadap adanya kemungkinan ijtihad (intrepretasi individual terhadap hukum Islam) yang bisa dilakukan oleh para ahli agama di abad ketiga Islam dan sama dengan mengabaikan kenyataan adanya pembaharuan dan penambahan nyata dalam pikiran-pikiran sosio-politik dan hikum sejak akhir abad delapan belas sampai sekarang.

Penerapan Syariat Islam Bukan Sekedar Isu Elite Politik

Van Scholten menegaskan bahwa ketidakmungkinan kita memungkinan kita memahami hukum di Indonesia secara utuh antara lain karena dalam kenyataam, substansi hukum masyarakat Indonesia berkaitan dengan persoalan batiniah. Dari segi ini, selain Islam memprioitaskan hukum bersandarkan Quran dan Sunnah , umat Islam juga memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Seperti berlakunya hukum adat yang direalisasikan umat Islam (Jawahir,2002, p. 27).

Dengan demikian, tugas utama dan mendesak umat Islam dewasa ini yaitu selain perlu meningkatkan pemahaman atas ajaran-ajaran Islam yang komprehensif , ilmiah, dan kritis, dan bagaimana kita sekaligus berusaha untuk mencegah penyakit rohani dikalangan umat Islam. Mencari pembuktian yang valid dan kondusif, di mana keunggulan syariat Islam sebagai Hidayah, dapat menjadi masukan yang mampu memperkuat dimensi kerohanian atau keimanan umat Islam.

Karena itu, kita perlu politik umat Islam. Kita lihat tahun 1998, timbul masalah ke mana umat menyalurkan aspirasinya. Para pelaku politik harus berpikir. Jangan Islam hanya Cuma sebagai *kamuflase*, sebagai *lip service*, sebagai penjaring suara. Mereka yang menjadikan Islam Cuma untuk itu, sejarah sudah mengajarkan kalaupun berhasil akhirnya tergulung sendiri (Zainuddin, 1997,p. 187). Berarti, kita tetap perlu partai Islam. Tapi begini, kenapa dulu orang keberatan dengan asas tunggal? Karena pemikiran induknya adalah kalau partai Islam tidak ada, tertutuplah kemungkinan mendirikan negara Islam. Sekarang, masalahnya apakah negara Islam itu suatu kebutuhan? Apakah itu suatu kewajiban. Di sini Sunni menganggap itu masalah *mashalihul-ammah*, referendum. Kalau rakyat banyak setuju, di buat. Kalau tidak, yang penting ajaran Islam bisa jala di negara itu, namanya apapun bukan soal. Tetapi kalau syiah tidak seperti itu, tiga orang pun bisa membuat negara.

Dari pendapat, Almarhum K.H. Zainuddin diatas, berarti tak mungkin menjadikan Indonesia ini negara Islam. Kalau memorandum mungkin saja. Saya berpikir, bagi Islam, soal bentuk negara itu tidak jadi soal. Apapun namanya, yang penting ajaran Islam berjalan di negara ini. Saya pikir sejak awal berdirinya negara kita sudah merupakan satu bukti toleransi umat Islam Indonesia kepada bangsa. Mau menerima Pancasila, dan menerima Republik Indonesia. Saat itu kita kita tidak ngotot jadi negara Islam saja. Jadi, apakah kita harus mundur lagi dari sejarah.

Agar Isu syariat Islam tidak terkesan menjadi kepentingan elite tertentu , maka sudah seharusnya dakwah-dakwah kita diarahkan pada perbekalan yang mencerdaskan masyarakat Islam secara utuh. Salah satu bukti bahwa kegagalan dakwah tersebut terlihat pada data bahwa sekitar 28,9 % umat Islam tidak

menyetujui pelaksanaan hukum pidana Islam khususnya mengenai potong tangan dan hukum Rajam. Kekuatan sosial umat Islam terutama yang terbaca dalam kedua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama (NU) tergolong pada pandangan yang tidak memaksakan syariat Islam harus menjadi bendera agama (Jawahir,2002,p. 30). Perjuangan menerapkan syariat Islam bukan sekedar isu elit politik belaka, melainkan lebih merupakan kebebasan asasi yang perlu diperjuangkan secara demokratis.

Dakwah Islam sebagai Ideologi Politik Masa Mendatang

Dasar ideologis dan sosiologis menegakkan hukum bersandarkan syariat Islam adalah perlunya proses pemahaman ajaran Islam yang komprehensif (*Kaffah*). Suatu model pemahaman sekaligus penerapan ajaran Islam Quran dan Sunnah yang dimulai dari keyakinan bahwa syariat Islam menawarkan berbagai solusi kondusif.¹Islam dari dua manifestasi politiknya yang nyata : sebagai satu ideologi yang bisa dikenal dan sebagai kelompok-kelompok dan pelaku-pelaku tertentu yang pengaruh dan kekuatannya disahkan oleh ideologi Islam (Jhon,1981,p. 39)

Islam akan menyelesaikan kontradiksi dan pertentangan diantara umat Islam sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan baik secara ilmiah maupun praktis dalam mengelola hal-hal kenegaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan kekhalifahan, bila sudah berdiri di masa mendatang. Hasan Al Banna mengatakan politik segala hal yang berkaitan dengan memikirkan (dan bertindak) tentang persoalan internal dan eksternal ummat. Konsep Islam yang menyeluruh mengenai kehidupan tergambar dalam Al Quran sendiri yang mengatur seluruh tindak tanduk dan sepak terjang mulai dari sosial, ekonomi dan kenegaraan. Bahkan dalam praktek Rasulullah sendiri pengelolaan kekuasaan di Madinah dilembagakan dalam Piagam Madinah. Jelas di sini, konsep dan contoh tidak ada kontradiksi seperti terjadi di sebagian kalangan umat Islam. Mengingat asingnya keterlibatan umat Islam dalam kehidupan politik kenegaraan maka menghilangkan kecanggungan itu perlu dilakukan secara berangsur-angsur.

Model dakwah yang cenderung agresif ,menyerang dan menjelekan yang pihak lain, tampaknya harus mulai diarahkan kepada upaya *self correction*. Panggilan hadist Nabi, yaitu evaluasi dulu diri dan tubuh umat Islam sebelum mengevaluasi tubuh orang lain, umat dan bangsa lain. Kemungkinan menegakkan syariat Islam tentu lebih diutamakan secara *jam'i*. Karena itu penyelesaian konflik internal umat Islam menjadi modal sosial yang harus dimiliki umat Islam. Jika upaya-upaya menandingi peradaban Barat saat ini sedang berada dalam ujung krisis berkepanjangan (Jawahir,2002,p. 30). Apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu perjuangan dari hati (keyakinan) masyarakat yang harus tumbuh , dari masyarakat dan dipercepat dengan perjuangan melalui kekuasaan negara. Keseimbangan memperjuangkan syariat Islam dari masyarakat secara berkesinambungan,

¹ Jawahir Thontowi,*Op.Cit*, hlm. 26

merupakan tuntutan ajaran Islam yang perlu dielaborasikan oleh kaum muslimin pada saat Indonesia sedang mencari format kenegaraan yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami beberapa hal, pertama, secara ontologis pendidikan karakter merupakan upaya kolaborasi edukatif dari tiga aspek yaitu pengetahuan, perasaan dan perbuatan. Dalam Islam pendidikan karakter merupakan pendidikan Akhlak atau budi pekerti yang pada hakekatnya merupakan jiwa dari pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan karakter dalam Islam adalah untuk membentuk karakter muslim sejati yang diinginkan oleh Alquran. Politik sebagai media dakwah mengatur masyarakat untuk mencapai ridha Allah seharusnya dipraktekkan oleh kalangan umat Islam yang komit dengan tujuan-tujuan Islami. Pendidikan karakter melalui konsep Islam tidak dapat ditawarkan lagi karena rapuhnya bangsa ini banyak disebabkan karena pendidikan tidak membekali dan menciptakan manusia yang berbudi pekerti yang baik namun lebih mengedepankan pencapaian kulaitas akademik kuantitatif yang pada akhirnya hanya dicapai pengetahuan atau kecerdasan intelektual belaka. Dan pengalaman menunjukan bahwa pendidikan yang mengedepankan pengembangan intelektual selama ini telah membawa pendidikan kita pada potret suram yang kurang baik. Pengenalan partai politik berasas Islam dengan perangkat *leadership*, administrasi dan struktur yang modern akan memberikan rasa percaya umat kepada adanya sebuah konsep yang hidup dalam praktek. Amal yang kentara dalam mengatur kekuasaan yang adil oleh pelaku kenegaraan memberikan kemakmuran serta kepercayaan masyarakat terhadap Islam sebagai masa depan pengaturan politik. Politik tidak hanya dakwah mengatur kekuasaan dalam tingkat sebuah entitas politik, maka studi dan praktek politik di era globalisasi perlu dilakukan di tataran internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2020). Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Pandemi Covid 19 pada Lingkungan Keluarga. *Journal of Islamic Education*, 5(2), 169–182.
- Ahmadi.(1992). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Aditya Media
- Anwas, Oos M. (2010). *Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan*.Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 16 (3), 257-265
- Homas W. Arnold. (1977). *The Preacing of Islam (Sejarah Dakwah Islam)*. IAIN Jakarta
- Imam Addaruqutni. (1997). *Islam dan Moralitas Hukum Masyarakat Berkeadilan dalam Serial Khutbah Kontemporer Beragama di Abad Dua Satu*.CV Zikru – Hakim

Jawahir Thontowi. (2002). Islam, politik dan Hukum. Yogyakarta : Madyan Press

Johansyah. (2011). Pendidikan Karakter dalam Islam : Kajian dari Aspek Metodologis. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11 (1), 85-103

John. L. Esposito. (1981). Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang. PLP2M

Muhsinin. (2013). Model Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Islam untuk membentuk Karakter Siswa yang Toleran. Educasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 8 (2), 205-228

Nurcholish Madjid. (1999). Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi". Paramadina

Prayitno dan Belferik Manulang. (2011). Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa, Jakarta: PT Grasindo

Soewadji, J. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sujarweni, V.W. (2019). Metodologi Penelitian. Pustakabaru press.

Suryabrata, S. (1983). Metodologi Penelitian. Rajawali

Syaiful, Mujani. (1997). Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. PT Gramedia Pustaka Utama

Zainuddin, M.Z. (1997). Dakwah dan Politik „Dai Sejuta Umat“. Mizan Anggota IKKAPI

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License